

EFEKTIVITAS PELAYANAN DATA DAN INFORMASI
DI BIDANG ARSIP DAN MUSEUM
PADA PUSAT DATA DAN INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Disusun Oleh:

NAMA : TUTI ALAWIAH
NPM. : 1733016118
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR
KONSENTRASI : MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR



POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

SKRIPSI

PROGRAM SARJANA TERAPAN
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
TAHUN 2021

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN
JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : TUTI ALAWIAH
NPM. : 1733016118
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR
KONSENTRASI : MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PELAYANAN DATA DAN
INFORMASI DI BIDANG ARSIP DAN
MUSEUM PADA PUSAT DATA DAN
INFORMASI SEKRETARIAT JENDERAL
DPR RI

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan
Pada

Pembimbing



Dr. Mala Sondang Silitonga, MA

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Terapan
Politeknik STIA LAN di Jakarta pada

Ketua merangkap anggota,



Dr. Asropi, S.IP, M.Si

Sekretaris merangkap anggota,

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Rimayh', is positioned over a faint, large watermark of the institution's name 'POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA'.

Rima Ranintya Yusuf, S.IP,M.PA

Anggota,

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Mala Sondang Silitonga', is written over a faint, large watermark of the institution's name 'POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA'.

Dr. Mala Sondang Silitonga, MA

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Tuti Alawiah
NPM. : 1733016118
Program Studi : Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur
Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini dengan judul Efektivitas Pelayanan data dan Informasi Bidang Arsip dan Museum pada Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata-tertib di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, Juli 2021

Penulis,

Materai 10.000

Tuti Alawiah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selalu penulis haturkan ke hadirat Allah Swt., karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan. Shalawat dan salam tidak lupa akan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi yang penulis buat dengan judul “Efektifitas Pelayanan Data dan Informasi Bidang Arsip dan Museum pada Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat akademik memperoleh gelar Sarjana Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta.

Penulis juga ingin mengucapkan banyak terimakasih terhadap semua pihak yang sangat berpengaruh dan mempunyai andil besar dalam proses penyelesaian studi dan skripsi ini, penulis sampaikan kepada suami dan anak-anak, ibunda, saudara, dan teman-teman kantor yang sudah memberi doa dan memotivasi penulis tanpa kenal lelah.

Semua yang penulis capai pada saat ini, tidak akan mampu menyaingi dan mengganti semua yang telah mereka berikan kepada penulis.

Tak lupa penulis juga berterimakasih kepada Dr. Mala Sondang Silitonga, MA sebagai pembimbing yang telah menuntun dan memberikan bimbingan kepada penulis hingga terwujudnya skripsi ini. Akhir kata, penulis mohon

maaf atas kekurangan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, karena tidak ada sesuatu yang sempurna, kecuali Tuhan Yang Maha Menciptakan. Kritik dan saran yang sifatnya membangun, juga penulis harapkan dari berbagai pihak. Semoga kehadiran karya ini mendapat tempat dan bermanfaat bagi para pembaca, akademisi, dan instansi tempat Penulis bekerja. Semoga semua hal yang telah diberikan oleh berbagai pihak dapat menjadi ladang ibadah di sisi Allah SWT.

Bekasi, Juli 2021

Penulis

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

ABSTRAK

Salah satu tugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan. Pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab bagi setiap instansi. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Semua instansi pemerintah berusaha meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungannya untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelayanan data dan informasi di Bidang Arsip dan Museum pada Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelayanan data dan informasi, pengelolaan data dan informasi serta untuk mengetahui strategi yang tepat dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan data dan informasi di Bidang Arsip dan Museum. Lokasi penelitian dilakukan di Sekretariat Jenderal DPR RI Bidang Arsip dan Museum yang merupakan menjadi tempat penyelamatan serta pelestarian arsip dan pemanfaatan naskah sumber arsip DPR RI. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode analitis yaitu merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Bidang Arsip dan Museum memiliki 4 standar pelayanan yaitu standar pelayanan data, standar pelayanan bimbingan teknis, standar pelayanan konsultasi dan standar pelayanan kunjungan delegasi. Kemudian Bidang Arsip dan Museum juga menggunakan sistem layanan terbuka (*open access system*) yaitu pengguna dapat langsung mencari/menelusuri sumber informasi secara online melalui Sistem Informasi Arsip (SIAr).

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan, Strategi Pelayanan

ABSTRACT

One of the main tasks of the government is to provide services. Public service is all forms of services, both in the form of public goods and public services are in principle be the responsibility for each agency. Any Public Information is open and accessible to any User of Public Information and any Public Information must be obtained each Applicant Information the Public with quick and timely, low cost, and simple way. All agencies of the government trying to improve the management and service information in the environment to produce a service quality information. The issues raised in this research is how the data and information services in the Field of Archives and Museum at the Center for Data and Information of the Secretariat General of the house of representatives.

The purpose of this study was to determine the process data and information services, data and information management as well as to know the right strategy in order to optimize the management of data and information in the Field of Archives and Museum. Location of the research conducted in the Secretariat General of the PARLIAMENT the Field of Archives and the Museum is a place of rescue and preservation of archives and the utilization of the manuscript sources of the archives of the house of representatives. Researchers used a qualitative descriptive type of research with the analytical method that is a research procedure that produces descriptive data in the form of words written or spoken of the people and behaviors that can be observed.

The conclusion of this research is the Field of Archives and Museum features the 4 standard service, which is a standard data services, service standards and technical guidance, service standards consultation and service standards the visit of the delegation. Then the Field of Archives and Museum are also using the system service open (open access system) that the user can instantly search/browse the source of the information online through the Archival Information System (SIAr).

Keywords: Public Services, The Quality of Service, Service Strategy

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
Abstrak.....	vii
Daftar Isi	ix
Abstract.....	viii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Fokus Permasalahan.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
Bab II Kerangka Teori	
A. Tinjauan Teori	
1. Teori Efektivitas.....	12
2. Teori Pelayanan.....	16
3. Pengertian Data dan Informasi.....	22
B. Konsep Kunci.....	23
C. Kerangka Berfikir.....	25
Bab III Metodologi Penelitian	

A. Metode Penelitian.....	29
B. Teknik Pengumpulan Data.....	31
C. Prosedur Pengolahan dan Analisis Data.....	35
D. Rencana Pengujian Keabsahan Data.....	37
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	
A. Hasil Penelitian	39
1.Deskripsi Objek Penelitian	42
2. Deskripsi Hasil Penelitian.....	42
B. Pembahasan.....	64
Bab V Kesimpulan dan Saran	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
Daftar	
Pustaka.....	77
Lampiran.....	80
Riwayat Hidup Penulis.....	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1		3
Tabel 1.2		6
Tabel 3.2		31

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	44
Gambar 4.2	53
Gambar 4.3	54
Gambar 4.4	58

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran informasi yang tersedia. Negara wajib memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi mengingat hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis (Pasal 28F UUD 1945).

Sejak lahirnya UU nomor 14 tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai salah satu badan publik berkomitmen dalam menerapkan prinsip keterbukaan terhadap akses informasi publik yang ada di bawah penguasaannya. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai supporting sistem dalam kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat dituntut untuk selalu siap dalam menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan.

Bidang Arsip dan Museum pada Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan unit kearsipan yang berdasarkan Undang undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 17 menyatakan (1) unit kearsipan pada pencipta arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) memiliki fungsi diantaranya mengolah arsip dan menyajikannya menjadi informasi dan diperkuat dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Sekjen No. 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang menyatakan bahwa Bidang Arsip dan Museum Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas dan fungsi pembinaan dan pengelolaan kearsipan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Bidang Arsip dan Museum merupakan unit kearsipan Sekretariat Jenderal DPR RI yang tugasnya mengolah, menyimpan dan memberikan pelayanan terhadap arsip-arsip yang terkait dengan kegiatan anggota DPR RI (arsip yang berkaitan dengan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran) dan arsip-arsip kesekretariatan yang masih memiliki nilai guna tinggi bagi para penentu kebijakan maupun bagi masyarakat luas.

Bidang Arsip dan Museum dikepalai seorang kepala bidang dengan jumlah pegawai terdiri dari :

Tabel 1.1

Pegawai Bidang Arsip dan Museum

Tingkat Pendidikan	Jabatan	Jumlah
S2	Kepala Bidang Arsip dan Museum	1
S1	Arsiparis Tk Ahli	8
	Pamong budaya	2
	PPN ASN	3
Diploma 3	Arsiparis Tk Terampil	4
	PPN ASN	2
SMA	Arsiparis Tk Terampil	7

Jumlah arsiparis Bidang Arsip dan Museum Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI saat ini memiliki 8 arsiparis tingkat ahli dan 11 arsiparis tingkat terampil. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Sekjen No. 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki 121 unit pengolah. Pengelolaan arsip inaktif di unit kerja/unit pengolah Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan tanggungjawab Bidang Arsip dan Museum sebagai unit kearsipan Sekretariat Jenderal DPR RI. Saat ini jumlah arsip inaktif yang dikelola di

unit kearsipan berjumlah 6.154 boks arsip konvensional (kertas) dan 190.460 arsip media baru (kaset, CD/DVD dan minidivi). Dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya terutama setelah habis masa periode keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat RI setiap 5 tahun sekali.

Banyaknya isu-isu yang berkembang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi anggota DPR menjadikan arsip menjadi hal yang sangat penting dalam perkembangan sejarah Indonesia. Di lembaga DPR lah peraturan-peraturan perundangan dibuat dan disahkan. Berbagai macam kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak terlepas dari arsip-arsip yang dikelola Bidang Arsip dan Museum saat ini.

Terpusatnya penempatan arsiparis di Bidang Arsip dan Museum pada Pusat Data dan Informasi juga menjadi salah satu penyebab pelayanan yang kurang optimal. Dengan tidak adanya arsiparis atau pegawai khusus yang mengelola arsip di unit kerja menyebabkan arsip-arsip yang memiliki nilai guna tinggi banyak yang tidak lengkap (hilang) pada saat diserahkan ke Bidang Arsip dan Museum Pusat Data dan Informasi.

Arsip yang dikelola dengan baik dapat berpengaruh terhadap pelayanan data dan informasi yang diberikan kepada pengguna data dan informasi. Data dan informasi yang autentik, utuh dan terpercaya adalah data yang bisa dijadikan rujukan/referensi dalam pembuatan keputusan dan kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPR RI. Dalam Undang undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik memperkuat pentingnya kewajiban pencipta arsip sebagai badan publik untuk menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.

Kewajiban-kewajiban yang diamanatkan dalam dua undang-undang tersebut bahkan diancam dengan sanksi administratif dan sanksi pidana. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa pimpinan instansi dan/ atau pelaksana pencipta arsip yang tidak menyediakan arsip dinamis kepada pengguna yang berhak, dijatuhi sanksi administratif mulai dari teguran tertulis sampai sanksi pembebasan dari jabatan. Sedangkan sanksi pidana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Tabel 1.2

Pelayanan Data dan Informasi

Tahun	Jumlah	Data yang diberikan		Data tidak dikuasai
		Lengkap	Tidak Lengkap	
2019	148	66	36	26
2020	98	81	10	7

Pada tahun 2020 Bidang Arsip dan Museum melayani 98 permintaan data dan informasi. Pelayanan data dan informasi tahun 2020 ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 148 permintaan data. Tahun 2020 adalah tahun mulainya wabah covid 19 sehingga para pengguna data lebih banyak memanfaatkan aplikasi SIAR dibandingkan harus datang secara langsung ke Bidang Arsip dan Museum. Tahun 2020 dari 148 permintaan data dan informasi tersebut hanya 122 yang datanya dimiliki Bidang Arsip dan Museum dan 26 data tidak dikuasai Bidang Arsip dan Museum. Untuk tahun 2019 dari 98 permintaan data terdapat 7 permintaan data yang tidak dikuasai Bidang Arsip dan Museum.

Bidang Arsip dan Museum menggunakan sistem layanan terbuka (open access system) yaitu pengguna dapat langsung mencari/menelusuri sumber informasi secara online melalui Sistem Informasi Arsip (SIAR) di www.dpr.go.id/arsip. Sistem Informasi Arsip (SIAR) DPR RI berbasis teknologi informasi ini dibuat dalam rangka memberikan pelayanan data

dan informasi yang bersumber dari arsip secara online yang dapat diakses oleh masyarakat secara umum.

Masa pandemi sekarang ini, pelayanan data dan informasi secara online sangat diperlukan para pengguna data dan informasi. Para pengguna data dan informasi tidak perlu lagi datang secara langsung ke Sekretariat Jenderal DPR RI bila mencari data dan informasi. Para pengguna informasi bisa dengan mudah mengakses SIAR di www.dpr.go.id/arsip.

Akan tetapi data dan informasi yang disajikan di aplikasi SIAR belum memenuhi permintaan data dari pengguna sepenuhnya. Masih banyaknya data yang belum disajikan dan banyaknya data yang sudah disajikan tetapi belum lengkap menjadi penyebab para pengguna data dan informasi tetap datang secara langsung ke Bidang arsip dan Museum pada Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Untuk pengguna data dan informasi internal (anggota DPR RI, pegawai Setjen DPR RI, Tenaga ahli dan asisten pribadi anggota DPR RI) Bidang Arsip dan Museum pada Pusat Data dan Informasi memberikan pelayanan data dan informasinya secara langsung kepada pengguna data dan informasi yaitu dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan.

Untuk permohonan data dan informasi dari luar instansi (eksternal) harus melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi) yang berkedudukan di Bagian Humas Biro Pemberitaan Parlemen.

Bidang Arsip dan Museum berada di bawah eselon II Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Untuk mendapatkan data dan informasi dari Bidang Arsip dan Museum, PPID harus mengirim surat terlebih dahulu ke Kepala Pusat Data dan Informasi yang selanjutnya Kepala Pusat Data dan Informasi akan mendisposisikan suratnya ke Kepala Bidang Arsip dan Museum. Kepala Bidang Arsip dan Museum pada Pusat Data dan Informasi selanjutnya memberi disposisi suratnya ke Koordinator Bidang Pelayanan data dan Informasi untuk ditindaklanjuti. Dan ini salah satu penyebab tidak efektifnya pelayanan Data dan informasi yang diberikan. Birokrasi yang berbelit-belit dengan banyaknya pintu yang harus dilalui menyebabkan lamanya waktu pelayanan data dan informasi.

Berdasarkan laporan survey kepuasan masyarakat terhadap PPID tahun 2020, PPID mendapat nilai A atau sangat memuaskan. Dari hasil survey ada unsur-unsur yang perlu ditingkatkan yaitu kemudahan mekanisme, sistem dan prosedur dan waktu penyelesaian. Hal ini terkait dengan pelayanan data dan informasi Bidang Arsip dan Museum sebagai salah satu sumber data bagi pelayanan data dan informasi di PPID. Data dan informasi yang lengkap akan mempengaruhi waktu penyelesaian dalam pelayanan data dan informasi bagi pengguna data dan informasi eksternal. Begitu pula dengan kedudukan PPID dibawah Biro Humas dan Bidang Arsip dan Museum yang berada di bawah Pusat Data dan Informasi membuat lamanya surat permohonan data dan informasi sampai ke Bidang Arsip dan Museum. Hal ini yang menyebabkan lamanya waktu

penyelesaian proses pelayanan data dan informasi bagi pengguna eksternal.

Melihat kondisi permasalahan diatas maka objek penelitian ditekankan pada mengapa pelayanan data dan informasi Bidang Arsip dan Museum pada Pusat Data dan Informasi belum efektif, sehingga nantinya ditemukan solusi agar pelayanan data dan informasi di Bidang Arsip dan Museum pada Pusat Data dan Informasi menjadi lebih efektif.

B. FOKUS PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan yang hendak dibahas yaitu:

1. Bagaimana pelayanan data dan informasi di Bidang Arsip dan Museum pada Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan arsip yang merupakan sumber data dan informasi di Bidang Arsip dan Museum pada Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI seharusnya dilakukan?
3. Bagaimana strategi yang diperlukan untuk mengoptimalkan efektivitas pengelolaan arsip di Bidang Arsip dan Museum pada Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui proses pelayanan data dan informasi di Bidang Arsip dan Museum pada Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI;
2. Untuk mengetahui pengelolaan data dan informasi di Bidang Arsip dan Museum pada Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI;
3. Untuk mengetahui strategi yang diperlukan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan data dan informasi di Bidang Arsip dan Museum pada Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Manfaat bagi Sekretariat Jenderal DPR RI : Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai masukan dan informasi untuk dijadikan acuan dalam rangka meningkatkan pelayanan data dan informasi Bidang Arsip dan Museum pada Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI;

2. Manfaat bagi Peneliti : Memberikan pengetahuan bagaimana kualitas pelayanan data dan informasi yang diterapkan oleh Bidang Arsip dan Museum pada Pusat data dan Informasi sehingga mampu mengakomodasi permintaan data dan informasi baik pengguna informasi yang berasal dari internal maupun eksternal instansi Sekretariat Jenderal DPR RI;
3. Manfaat bagi Pengguna Informasi: Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempermudah pengguna informasi dalam mencari data dan informasi secara mudah dan cepat.

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**